



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

KANTOR WILAYAH SULAWESI BARAT
Jln. K.H.Abd. Malik Pattana Endeng Rangas Mamuju
Telp. (0426)2325088 Fax. (0426) 2325088
Laman :<http://sulbar.kemenkumham.go.id>

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR OUTPUT	VOLUME/SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
INDIKATOR KINERJA UTAMA KEPALA KANTOR WILAYAH				
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Tepat Sasaran	Layanan Perkantoran	Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan	1 Layanan
			Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor	
		Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	Persentase Satuan Kerja yang memiliki Perencanaan penganggaran berorientasi pada hasil SMART	2 Layanan
			Persentase Satuan Kerja yang mempunyai laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan	
			Persentase Satuan Kerja yang menindaklanjuti kebijakan pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	
			Persentase Layanan tata Usaha Keuangan yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan tepat waktu	
			Persentase Satuan Kerja yang merealisasi anggaran sesuai dengan RPD	
		Layanan Umum	Persentase Satuan Kerja yang melakukan perencanaan BMN secara tepat waktu dan akurat	1 Layanan
Persentase menurunnya nilai temuan				

			terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	
			Persentase rekomendasi atas usulan penggunaan dan pemanfaatan BMN serta penyelesaian permasalahan yang ditindaklanjuti	
			Persentase Satuan Kerja yang data BMN-nya tercatat, tervalidasi, dan akurat	
			Persentase nilai BMN yang rusak berta/hilang yang ditindaklanjuti	
		Layanan SDM	Persentase pegawai yang memperoleh hak-hak yang terdapat di dalam UU ASN mulai dari Recruitment sampai dengan Retirement	108 Orang
		Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Persentase satuan kerja yang lulus evaluasi WBK/WBBM oleh Tim Penilaian Internal (TPI)	1 Layanan
		Layanan Kehumasan dan Protokoler	Persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti Persentase publikasi Kementerian Hukum dan HAM Jumlah pedoman NSPK bidang Keprotokoleran	2 Layanan
		Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	Persentase satuan kerja UKE 1 yang memperoleh Nilai LAKIP BB	1 Laporan
2	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang aman	Koordinasi	Persentase UPT Pemasarakatan di wilayah yang disupervisi dalam pelaksanaan tugas pemasarakatan di wilayah sesuai standar	33 Kegiatan
		Sosialisasi dan Diseminasi	Persentase UPT Pemasarakatan di wilayah yang disupervisi dalam pelaksanaan tugas pemasarakatan di wilayah sesuai standar	20 Orang
		Operasi Bidang Keamanan	Persentase pengaduan yang diselesaikan	16 Operasi

			Persentase pencegahan gangguan kamtib	
			Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidanan/Anak Pelaku gangguan Kamtib	
			Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	
			Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	
			Persentase gangguan kamtib yang ditindak dan ditanggulangi sesuai standar	
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan	Koordinasi	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian di Wilayah	10 Kegiatan
		Operasi Bidang Keamanan	Indeks Pengamanan Keimigrasian di wilayah	4 Operasi
4	Terwujudnya Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Hukum Umum	Terwujudnya Otoritas Pusat yang Efektif dan Tepat Sasaran	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	1 Rekomendasi
			Koordinasi	1 Kegiatan
			Pelayanan Publik Lainnya	1 Layanan
			Perkara Hukum Lembaga	1 Perkara
			Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	1 Lembaga
5	Terwujudnya Kekayaan Intelektual di Suluruh Indonesia	Sosialisasi dan Diseminasi	Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah	300 Orang
			Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah	
		Pelayanan Publik Lainnya	Jumlah Pemohon KI yang difasilitasi Kantor Wilayah	10 Layanan
			Pemantauan Produk	2 Laporan
6	Terbentuknya Peraturan Perundang-Undangan	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	Persentase rancangan peraturan daerah yang difasilitasi sesuai dengan	23 Rekomendasi

	yang difasilitasi		permohonan	
		Standarisasi Profesi dan SDM	Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	13 Orang
7	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berspektif	Kebijakan Bidang hukum dan HAM	Jumlah Rekomendasi Perlindungan dan Pemenuhan HAM	3 Rekomendasi
		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Jumlah Pemerintah Daerah yang melaksanakan Program Aksi HAM	4 Lembaga
			Jumlah KABupaten/Kota Peduli HAM	
8	Terwujudnya Pembinaan Hukum	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	Jumlah Rekomendasi kebijakan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	1 Rekomendasi
		Akreditasi Lembaga	Terselenggaranya Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum di wilayah	4 Lembaga
		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Jumlah Fasilitasi JDH di Seluruh Kantor Wilayah	5 Lembaga
		Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	12 Kelompok
			Jumlah Penyukluhan Hukum di daerah	
		Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum	4 Lembaga
		Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	48 Orang
		Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	7 Kelompok
9	Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan Hak Asasi Manusia	1 Rekomendasi
INDIKATOR KINERJA UTAMA KEPALA DIVISI ADMINISTRASI				
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang	Layanan Perkantoran	Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan	1 Layanan

Efektif dan Tepat Sasaran		Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor	
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	Persentase Satuan Kerja yang memiliki Perencanaan penganggaran berorientasi pada hasil SMART	2 Layanan
		Persentase Satuan Kerja yang mempunyai laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan	
		Persentase Satuan Kerja yang menindaklanjuti kebijakan pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	
		Persentase Layanan tata Usaha Keuangan yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan tepat waktu	
		Persentase Satuan Kerja yang merealisasi anggaran sesuai dengan RPD	
	Layanan Umum	Persentase Satuan Kerja yang melakukan perencanaan BMN secara tepat waktu dan akurat	1 Layanan
		Persentase menurunnya nilai temuan terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	
		Persentase rekomendasi atas usulan penggunaan dan pemanfaatan BMN serta penyelesaian permasalahan yang ditindaklanjuti	
		Persentase Satuan Kerja yang data BMN-nya tercatat, tervalidasi, dan akurat	
		Persentase nilai BMN yang rusak berta/hilang yang ditindaklanjuti	
	Layanan SDM	Persentase pegawai yang memperoleh hak-hak yang terdapat di dalam UU ASN mulai dari Recruitment sampai dengan Retirement	108 Orang

		Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Persentase satuan kerja yang lulus evaluasi WBK/WBBM oleh Tim Penilaian Internal (TPI)	1 Layanan
		Layanan Kehumasan dan Protokoler	Persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti	2 Layanan
			Persentase publikasi Kementerian Hukum dan HAM	
			Jumlah pedoman NSPK bidang Keprotokoleran	
		Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	Persentase satuan kerja UKE 1 yang memperoleh Nilai LAKIP BB	1 Laporan
INDIKATOR KINERJA UTAMA KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN				
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang aman	Koordinasi	Persentase UPT Pemasyarakatan di wilayah yang disupervisi dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan di wilayah sesuai standar	33 Kegiatan
		Sosialisasi dan Diseminasi	Persentase UPT Pemasyarakatan di wilayah yang disupervisi dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan di wilayah sesuai standar	20 Orang
		Operasi Bidang Keamanan	Persentase pengaduan yang diselesaikan	16 Operasi
			Persentase pencegahan gangguan kamtib	
			Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidanana/Anak Pelaku gangguan Kamtib	
			Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar				
Persentase gangguan kamtib yang ditindak dan ditanggulangi sesuai standar				

INDIKATOR KINERJA UTAMA KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN				
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan	Koordinasi	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian di Wilayah	10 Kegiatan
		Operasi Bidang Keamanan	Indeks Pengamanan Keimigrasian di wilayah	4 Operasi
INDIKATOR KINERJA UTAMA KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM				
1	Terwujudnya Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Hukum Umum	Terwujudnya Otoritas Pusat yang Efektif dan Tepat Sasaran	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	1 Rekomendasi
			Koordinasi	1 Kegiatan
			Pelayanan Publik Lainnya	1 Layanan
			Perkara Hukum Lembaga	1 Perkara
			Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	1 Lembaga
2	Terwujudnya Kekayaan Intelektual di Suluruh Indonesia	Sosialisasi dan Diseminasi	Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah	300 Orang
			Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah	
		Pelayanan Publik Lainnya	Jumlah Pemohon KI yang difasilitasi Kantor Wilayah	10 Layanan
		Pemantauan Produk		2 Laporan
3	Terbentuknya Peraturan Perundang-Undangan yang difasilitasi	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	Persentase rancangan peraturan daerah yang difasilitasi sesuai dengan permohonan	23 Rekomendasi
		Standarisasi Profesi dan SDM	Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	13 Orang
4	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berspektif	Kebijakan Bidang hukum dan HAM	Jumlah Rekomendasi Perlindungan dan Pemenuhan HAM	3 Rekomendasi
		Faslilitasi dan Pembinaan Lembaga	Jumlah Pemerintah Daerah yang melaksanakan Program Aksi HAM	4 Lembaga
			Jumlah KAbupaten/Kota Peduli HAM	
5	Terwujudnya Pembinaan Hukum	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	Jumlah Rekomendasi kebijakan perencanaan pembentukan dan	1 Rekomendasi

			pemantauan produk hukum daerah	
		Akreditasi Lembaga	Terselenggaranya Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum di wilayah	4 Lembaga
		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Jumlah Fasilitasi JDHN di Seluruh Kantor Wilayah	5 Lembaga
		Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	12 Kelompok
			Jumlah Penyukluhan Hukum di daerah	
		Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum	4 Lembaga
		Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	48 Orang
		Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	7 Kelompok
6	Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan Hak Asasi Manusia	1 Rekomendasi

Disusun oleh,
Kepala,



H. Anwar N.

NIP. 196307021990031003